

JURNAL TELAHAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 3. No. 2. Juli 2010

Hal. 206-220

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PERAN
INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)****Safrida Yuliani**

Alumni Program Magister Sains Akuntansi PPs Unsyiah

Nadirsyah

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

Usman Bakar

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar adanya fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tidak memenuhi kriteria sebagai syarat-syarat laporan keuangan yang berkualitas. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut diduga adalah pemahaman akuntansi (X_1), pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_2) dan peran internal audit (X_3).

Populasi dalam penelitian ini SKPD yang menyampaikan laporan keuangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. Selanjutnya untuk pengujian data dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan pengujian hipotesis. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda antara variabel independen dengan variabel dependen baik secara simultan maupun secara parsial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesemua variabel independen yang diturunkan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R^2 sebesar 0,281 lebih besar dari nilai 0. Pengaruh sebesar 28,1% menunjukkan bahwa pengaruhnya lemah karena nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,281$ lebih kecil dari 0,5. Diduga masih ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sementara itu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 20,7%, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 5% dan peran internal audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 12,1%.

Kata kunci : Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Interna Audit dan Kualitas Laporan Keuangan

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sejak awal tahun 2002, pemerintah daerah sudah membuat neraca awal daerah dengan mengacu kepada Pedoman SAKD hasil Tim Pokja SK Menkeu 355/2001 dan Kepmendagri 29/2002 dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta praktek-praktek internasional. Hingga saat ini, pemerintah daerah yang telah memiliki neraca daerah sebanyak 169 Pemerintah Daerah berdasarkan hasil asistensi yang dilakukan oleh BPKP sebagai anggota Tim Pokja 355/2001. Akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2009 seluruh Indonesia hanya 10 (sepuluh) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh gelar pendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.

Propinsi Aceh merupakan daerah yang mendapat prediket opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Dari 24 entitas yang ada, 5 kabupaten/kota telah mendapat prediket WTP. Daerah-daerah tersebut adalah Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa dan Aceh Tengah. Meraih opini WTP bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan. Untuk 19 entitas lainnya dapat dikatakan kualitas laporan keuangan masih rendah.

Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri atau belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan dan atau peran internal audit masih lemah.

Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, maka jajaran akademisi perlu mengkaji secara mendalam pada salah satu kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dalam hal ini kota Banda Aceh. Pengkajian dilakukan terbatas pada beberapa penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal auditor. Tujuannya adalah menganalisis besarnya pengaruh masing-masing terhadap kualitas laporan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Laporan Keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/ Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah setidaknya

tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama satu periode. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005 : KK – 6) menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Tanggungjawab dan Komponen Laporan Keuangan

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005 : 01 – 6) menjelaskan bahwa tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan entitas adalah setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dan setiap gubernur/ bupati/ walikota sebagai entitas pelaporan (STAN, 2007). Kewajiban dan tanggungjawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD tersebut selanjutnya disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang bertindak pula sebagai Bendahara Umum Daerah. PPKD sebagai SKPKD menyusun pula laporan keuangan sebagaimana yang berlaku pada SKPD.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005 : 01 - 5) menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman

- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Kualitas Laporan Keuangan

Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005 : KK-10) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pemahaman Akuntansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta : 2006) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Dengan demikian sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas

keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Peran Internal Audit

The Institute of Internal Auditor (1999) telah melakukan redefinisi terhadap internal auditing, disebutkan bahwa internal auditing adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal auditing membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi. Selanjutnya Sawyer's (2005:10) menggambarkan lingkup audit internal modern sebagai sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif.

Menurut *The International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing*, peran yang dimainkan oleh auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama; *jasa assurance* dan *jasa konsultasi*. *Jasa assurance* merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain. Jenis dan lingkup penugasan assurance ditentukan oleh auditor internal. *Jasa konsultasi* merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien (para auditi). Dalam melaksanakan jasa konsultasi, auditor internal harus tetap menjaga obyektivitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan dimana ketiga variabel tersebut berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat

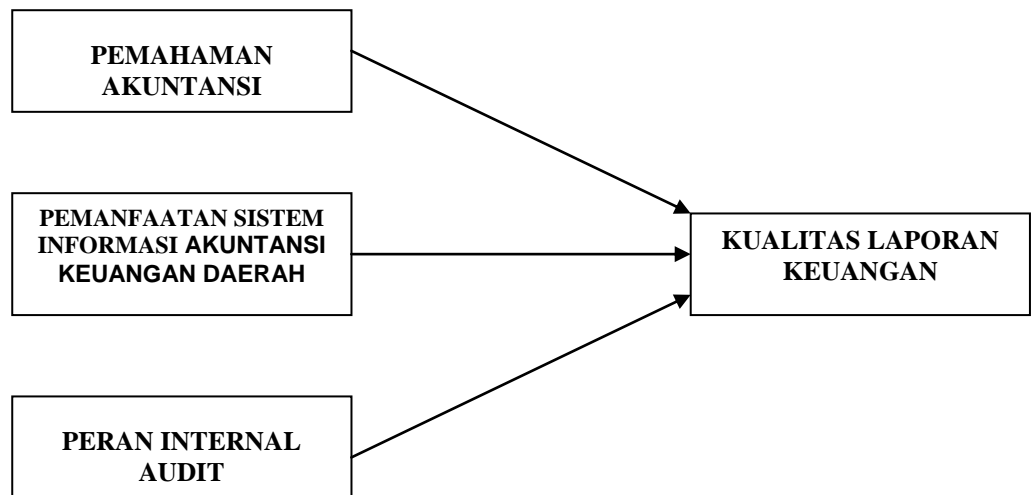
JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 3. No. 2. Juli 2010

Hal. 206-220

kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

Disamping itu adanya peran internal audit/ inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Dalam hal ini peran internal audit yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk memperjelas pengaruh dari masing-masing variabel tersebut, maka disajikan model sebagai berikut :



Gambar 2.1 Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka pengujian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

- H1 : Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- H2 : Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H3 : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- H4 : Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

3. METODE PENELITIAN

Populasi Penelitian

JURNAL TELAHAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 3. No. 2. Juli 2010

Hal. 206-220

Penelitian ini merupakan penelitian sensus yaitu populasi terdiri dari entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh berjumlah 35 SKPD dengan kriteria telah menyusun laporan keuangan tahun 2008. Pertimbangan pengambilan populasi pada penelitian ini bahwa selama tahun 2008 terjadi perubahan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Banda Aceh sehingga jumlah SKPD yang menyusun laporan keuangan sebanyak 22 SKPD.

Sedangkan yang menjadi responden penelitian adalah bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang terdiri dari kepala bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan yang disebut Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan staf bagian akuntansi yang disebut Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Pembantu PPK-SKPD). Sehingga terdapat sebanyak 66 objek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini.

Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu pemahaman akuntansi (X_1), pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_2) dan peran internal audit (X_3), sedangkan variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan (Y). Berikut dijelaskan definisi dan operasionalisasi variabel yaitu:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Referensi
X_1 Pemahaman Akuntansi	a. Tingkat Pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi b. Tingkat Pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan	ordinal	Komite Standar Akuntansi Pemerintah:2005;P oerwadaminta : 2006
X_2 Pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah	a. Tingkat kecepatan b. Tiingkat keamanan c. Tingkat efisiensi biaya d. Tingkat kualitas hasil.	Ordinal	Modul SIA ; Dunia Akuntansi dan Manajemen, 2008
X_3 Peran Internal Audit	a. Penilaian keandalan informasi keuangan. b. Penilaian ketaatan c. Penilaian kinerja d. Penilaian efisiensi dan efektivitas program e. Tingkat obyektivitas auditor internal	Ordinal	Sawyer's, 2005 : 10 ; <i>The Institute of Internal Auditor</i> : 1999

JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 3. No. 2. Juli 2010

Hal. 206-220

Y Kualitas Laporan Keuangan	a. Tingkat relevansi b. Tingkat keandalan c. Tingkat keterbandingan d. Tingkat keterpahaman	Interval	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005 : KK – 10)
--------------------------------------	--	----------	---

Metode Analisis Data

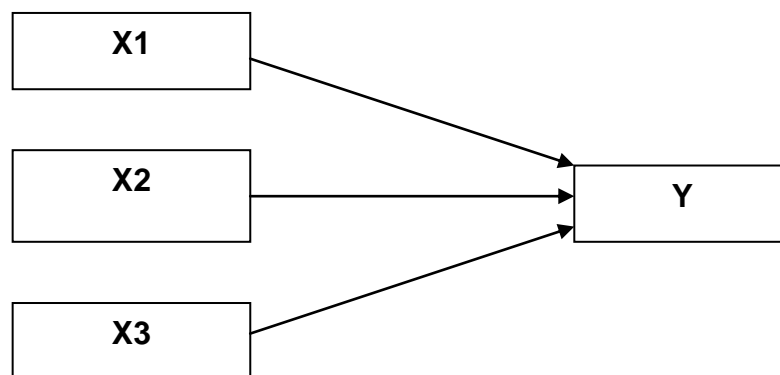
Dalam menganalisis data digunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada metode kualitatif semua data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendapat para ahli sebagai landasan teori. Kuesioner yang telah diisi oleh responden diquantitatifkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan keluaran-keluaran berupa angka yang selanjutnya dianalisis melalui program SPSS (*Statistical Package for Social Science*).

Setelah kuesioner terkumpul untuk melakukan analisis data perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan sesuai dengan yang diukur dan juga konsistensi dengan data yang dikumpulkan.

Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian analisis regresi linier berganda yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel dan untuk melihat pengaruh secara parsial dan simultan.

Rancangan pengujian hipotesis berdasarkan kerangka pemikiran adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Rancangan teknik analisis data

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X₁ = Pemahaman Akuntansi

X₂ = Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

X₃ = Peran Internal Audit

Persamaan model empiris yang digunakan untuk meneliti pengaruh X₁, X₂ dan X₃ terhadap Y dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X₁ = Pemahaman Akuntansi

X_2	=	Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
X_3	=	Peran Internal Audit
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien X_1, X_2, X_3
α	=	konstanta
e	=	error

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *Pearson Product-Moment coefficient of correlation*. Berdasarkan *output* computer dari 41 pernyataan dinyatakan valid karena nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan untuk 41 item berada di atas nilai kritis korelasi *product moment*. Hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data

a. Hasil pengujian validitas atas Pernyataan Pemahaman Akuntansi

Kode	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis 5% (N=66)	Keterangan
PAkt1	0,309	0,244	Valid
PAkt2	0,585		Valid
PAkt3	0,277		Valid
PAkt4	0,912		Valid
PAkt5	0,630		Valid
PAkt6	0,440		Valid
PAkt7	0,745		Valid
PAkt8	0,870		Valid
PAkt9	0,881		Valid
PAkt10	0,907		Valid
PAkt11	0,831		Valid

b. Hasil pengujian validitas atas Pernyataan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Kode	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis 5% (N=66)	Keterangan
PSIKD1	0,456	0,244	Valid
PSIKD2	0,880		Valid
PSIKD3	0,944		Valid
PSIKD4	0,983		Valid
PSIKD5	0,983		Valid
PSIKD6	0,983		Valid
PSIKD7	0,973		Valid
PSIKD8	0,936		Valid

c. Hasil pengujian validitas atas Pernyataan Peran Internal Audit

Kode	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis 5% (N=66)	Keterangan
PAudit1	0,412	0,244	Valid
PAudit2	0,620		Valid
PAudit3	0,560		Valid
PAudit4	0,518		Valid
PAudit5	0,490		Valid
PAudit6	0,246		Valid
PAudit7	0,421		Valid
PAudit8	0,347		Valid
PAudit9	0,462		Valid
PAudit10	0,641		Valid
PAudit11	0,422		Valid

d. Hasil pengujian validitas atas Pernyataan Kualitas Laporan Keuangan

Kode	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis 5% (N=66)	Keterangan
KLK1	0,405	0,244	Valid
KLK2	0,630		Valid
KLK3	0,401		Valid
KLK4	0,306		Valid
KLK5	0,339		Valid
KLK6	0,368		Valid
KLK7	0,583		Valid
KLK8	0,326		Valid
KLK9	0,521		Valid
KLK10	0,485		Valid
KLK11	0,488		Valid

Sumber : Hasil Olahan Data Primer (2009)

Dari hasil pengujian validitas data menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh oleh masing-masing item dari variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran internal audit dan kualitas laporan keuangan berada di atas nilai kritis korelasi *product moment* (koefisien korelasi > 0,244) sehingga kuesioner yang digunakan dapat dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas juga dilakukan secara statistik dengan menghitung besarnya nilai *Cronbach's alpha*. Instrumen dalam penelitian ini *realible* (handal) karena nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,5 yang hasilnya seperti ditunjukkan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Rata-rata	Jumlah Item	Nilai Alpha	Kehandalan
1.	Pemahaman Akuntansi	4,146	11	0,894	Handal
2.	Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	3,634	8	0.969	Handal
3.	Peran Internal Audit	4,169	11	0,651	Handal
4	Kualitas Laporan Keuangan	4,059	11	0,591	Handal

Sumber : Hasil Olahan Data Primer (2009)

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficients B
Constanta	28,242
X ₁ ke Y	0,207
X ₂ ke Y	0,050
X ₃ ke Y	0,121
F hitung = 8,093 R = 0,530 ^a R ² = 0,281 R ² adjusted = 0,247	

Berdasarkan *output* komputer melalui program SPSS dari nilai *coefficients^a* di atas, maka persamaan regresi berganda diperoleh sebagai berikut:

$$Y = 28,242 + 0,207 X_1 + 0,050 X_2 + 0,121 X_3 + e$$

Pengujian secara Simultan

Untuk pengaruh secara simultan dapat dilakukan dengan melihat nilai R². Dari hasil pengujian pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan diperoleh nilai koefisien $\beta_1 = 0,207$, nilai koefisien $\beta_2 = 0,050$, nilai koefisien $\beta_3 = 0,121$ dan nilai R² sebesar 0,281.

Pengujian secara Parsial

- Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. $H_A : \beta_1 \neq 0$ yaitu $0,207 > 0$. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. $H_A : \beta_2 \neq 0$ yaitu $0,050 > 0$. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

- c. Pengaruh peran internal audit. $H_A: \beta_3 \neq 0$ yaitu $0,121 > 0$. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk meyakinkan bahwa adanya pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dapat dibuktikan dengan besaran koefisien $\beta_1 \neq 0$ yaitu $0,207 > 0$. Artinya, setiap dilakukan peningkatan pemahaman akuntansi kepada aparatur pemerintah daerah, maka akan meningkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan mereka sebesar 20,7%. Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan meningkat 20,7% jika diberikan tambahan pemahaman akuntansi kepada aparatur pemerintah daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk meyakinkan bahwa adanya pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dapat dibuktikan dengan besaran koefisien $\beta_2 \neq 0$ yaitu $0,050 > 0$. Artinya, setiap dilakukan peningkatan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan mereka sebesar 5,0%. Berarti, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh hanya meningkat 5% dijelaskan oleh pemanfaatan sistem informasi akuntansi.

Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk meyakinkan bahwa adanya pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan dapat dibuktikan dengan besaran koefisien $\beta_3 \neq 0$ yaitu $0,121 > 0$. Artinya, setiap dilakukan peningkatan peran internal audit, maka akan meningkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan mereka sebesar 12,1%. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa hanya 12,1% peran internal audit untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Pemkot Banda Aceh.

5. KESIMPULAN, KETERBATASANDAN SARAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan yaitu:

1. Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh
2. Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh

3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
4. Peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Keterbatasan

Sebelum peneliti memaparkan saran-saran untuk perbaikan bagi peneliti selanjutnya terlebih dahulu diungkapkan keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengaruh variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit tidak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan daerah karena masih dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
2. Instrumen dan daftar pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan mengadopsi dari literatur-literatur tinjauan kepustakaan dalam bab III penelitian ini sehingga dirasa masih banyak kelemahan-kelemahan
3. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dimana responden memberikan jawaban berdasarkan teori yang ideal bukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya sehingga mengakibatkan kekeliruan peneliti dalam memberikan kesimpulan penelitian yang bukan berdasarkan kenyataan sesungguhnya.

Saran-saran

Saran untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan peneliti memberi beberapa saran:

1. Para penyusun laporan keuangan yang terdiri dari PPK dan Pembantu PPK pada masing-masing SKPD memiliki latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda (tidak hanya berasal dari latar belakang ilmu akuntansi). Dengan demikian apabila pegawai yang bukan berasal dari disiplin ilmu akuntansi ditempatkan sebagai PPK dan Pembantu PPK pada SKPD hendaknya dapat diberikan pembekalan yang cukup mengenai dasar-dasar akuntansi.
2. Para PPK dan Pembantu PPK pada masing-masing SKPD umumnya belum mampu memanfaatkan program aplikasi penyusunan laporan keuangan berbasis komputer, hendaknya program tersebut dapat disosialisasikan kembali mengingat penggunaan program tersebut mampu menghemat waktu dan memberikan informasi yang lebih akurat dan handal.
3. Mengingat peran internal audit menjadi sangat penting dalam hal peningkatan kualitas laporan keuangan hendaknya fungsi internal audit dapat terus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya.

Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya. Untuk perbaikan selanjutnya peneliti memberi beberapa saran yaitu:

1. Menambah jumlah populasi dan melengkapi metode survei dengan wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat mewawancarai beberapa responden dan

- menemukan adanya perbedaan antara jawaban dalam kuesioner dengan jawaban secara lisan untuk pernyataan yang sama.
2. Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini atau menggunakan kuesioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih tinggi.
 3. Mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, misalnya pengalaman kerja.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akmal (2007). *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. Edisi Pertama. Penerbit PT. Indeks
- Arsyati (2008). "Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNBK dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi pada Universitas Syiah Kuala". *Tesis*
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2007). *Petunjuk Tehnis Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga*.
- (2007). *Pedoman Pemakaian Program Aplikasi PAKD Versi 3.0*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2007). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- (2008). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2007* Nomor 1.C/LHP/ XVIII.BAC/ 5/ 2008 tanggal 13 Mei 2008
- (2009). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008* Nomor 171.C/S/XVIII.BAC/07/2009 Tanggal 23 Juli 2009
- Bastian, Indra (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga
- (2006). *Audit Sektor Publik*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat.
- Darise, Nurlan (2006) . *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks
- (2008). *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Penerbit PT. Indeks
- Departemen Dalam Negeri (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- Dunia Akuntansi dan Manajemen. 31 Maret 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. <http://yusufsofyan.blogspot.com>
- Effendi, Arief. 2006. *Perkembangan Profesi Internal Audit Abad 21*. Seminar/ Kuliah Umum Universitas Internasional Batam
- Garda Era. *Pelatihan Akuntansi dan Manajemen BMT* . Modul SIA
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah. Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat
- Indriasari, Desi (2008). "Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah". Kumpulan Artikel Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI Pontianak 2008

JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 3. No. 2. Juli 2010

Hal. 206-220

- Jumaili, Salman (2005). *"Kepercayaan terhadap Teknologi Sistem Informasi Baru dalam Evaluasi Kinerja Individual"*. Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo, September 2005.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja*. Penerbit Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Layanan Pencarian Data 24 jam (2007). *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)* Studi Kasus pada Pemerintah Kota Blitar. Jurnal Skripsi dan Tesis.
- Laudon (2005). *Sistem Informasi Manajemen, Mengelola Perusahaan Digital*. Edisi 8. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi (2006). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Panduan bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis. Penerbit Erlangga.
- Nordian, Deddi. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Poerwadarminta. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Ketiga. Balai Pustaka.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh*.
- Republik Indonesia (2003). Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang *Pedoman dan Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*
- (2008). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- Romney, Marshall B, 2003. *Accounting Information System*. Edisi 9. Penerbit Salemba Empat.
- Sawyer, Lawrence B, 2005. *Internal Auditing*. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat.
- Sekaran, Uma (2006). *Research Methods for Business*. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Penerbit Salemba.
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2007). *Reviu Laporan Keuangan Daerah*. Tim Penyusunan Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik..
- (2007). *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Tim Penyusunan Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik.

JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 3. No. 2. Juli 2010

Hal. 206-220

-----, (2007). *Dasar-dasar Audit Internal Sektor Publik*. Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik.

Syafruddin, Muchamad (2006). *Dampak Struktur Kekuasaan Pada Penggunaan SIKD Untuk Kontrol Keputusan dan Manajemen Keputusan, dan Perilaku Manajerial, Studi Pada Organisasi Pemerintahan Daerah*, Universitas Diponegoro. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang

Overview. *Sistem Informasi Akuntansi*. www.stieykpn.ac.id

Wahyudi, Hendro (2006). *Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.

Waluya, Doni. *Peranan Audit Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer dalam Penyajian Financial Report*. Majalah Ilmiah Unikom. Volume 6, hlm 27 - 33.

Wikipedia Bahasa Indonesia. 14 Maret 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. "http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_akuntansi"

Yayasan Garda Era. *Pengertian Sistem Informasi Akuntansi*. Pelatihan Akuntansi dan Manajemen BMT.